

**SAMBUTAN/PENGARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA PEMBUKAAN MUSRENBANG REGIONAL
KALIMANTAN TAHUN 2016**

Jakarta, 11 Maret 2016

**Yth. Sdr. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas;**

Yth. Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

**Yth. Sdr. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia;**

**Yth. Sdr. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia;**

Yth. Sdr. Para Gubernur Se-Kalimantan;

Yth. Sdr. Para Ketua DPRD Provinsi Se-Kalimantan ;

Yth. Sdr. Para Bupati dan Walikota Se-Kalimantan;

Para undangan serta Hadirin yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua,

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menghadiri acara pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Regional Kalimantan Tahun 2016, dalam keadaan sehat wal-afiat.

Forum Musrenbang ini mempunyai arti penting, karena seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun pemerintah daerah.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Sesuai dengan amanat pasal 24 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kementerian bersama Pemerintah Daerah melakukan pemetaan Urusan Pemerintahan

yang diprioritaskan oleh setiap Daerah. Adapun tujuan pemetaan urusan pemerintahan daerah adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi pemerintahan yang ada saat ini dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, untuk menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan efisien dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta untuk memperkuat sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada aspek **kelembagaan, perencanaan dan penganggaran.**

Pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk menentukan intensitas urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan jumlah penduduk, besarnya APBD, dan luas wilayah. Sedangkan pemetaan urusan pemerintahan pilihan dilakukan untuk menentukan daerah yang mempunyai urusan pemerintahan pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan. Untuk hasil pemetaan ditetapkan dengan peraturan menteri terkait setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Pemetaan Urusan Pemerintahan digunakan oleh daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang juga digunakan oleh kementerian atau lembaga sebagai dasar pembinaan kepada daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan secara nasional.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Pulau Kalimantan, maka arah Pembangunan Wilayah Kalimantan sebagai berikut:

1. Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia, dengan meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi; serta mengembangkan sistem pencegahan dan penanggulangan bencana alam banjir dan kebakaran hutan.
2. Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi baru terbarukan berbasis biomassa dan air atau matahari atau sesuai dengan kondisi SDA masing-masing provinsi.
3. Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijihbesi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa.
4. Menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian di regional kalimantan antara lain :

1. Konektivitas wilayah, adalah meningkatkan keterkaitan desa-kota. Keterkaitan (konektivitas) wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

2. Kedaulatan Pangan, merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Energi, dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar energi listrik di Pulau Kalimantan, dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit dengan total kapasitas 1,87 GW oleh PLN dan Independent Power Producer (IPP). Selain pembangunan pembangkit, dilakukan pula pengembangan biogas ramah lingkungan dan penyediaan bahan bakar minyak di wilayah terpencil dan perbatasan.
4. Hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dilindungi. Pulau Kalimantan rentan dengan kondisi kebakaran hutan yang terjadi selama ini dan harus segera diselesaikan oleh pemerintah maupun oleh pemerintah daerah. Oleh Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan mensiagakan aparat keamanan hutan dan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.
5. Kemaritiman, wilayah Kalimantan memiliki posisi yang cukup strategis baik itu di koridor nasional, regional ASEAN, dan global. Dalam konteks nasional, Wilayah Kalimantan memiliki banyak potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baik migas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara, serta cadangan bijih besi terbesar di

Indonesia. Infrastruktur, sebagai penunjang dari aktivitas ekonomi Wilayah Kalimantan juga dihadapkan pada isu keterbatasan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar (energi dan sumber daya air);

6. Wilayah perbatasan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sasaran pengembangan wilayah Pulau Kalimantan terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depan Negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

Hadirin yang saya muliakan,

Penyelenggaraan Penataan Ruang di Pulau Kalimantan saat ini, dari 5 (lima) provinsi di wilayah Kalimantan telah ditetapkan 4 (empat) Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yaitu: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Sedangkan Kalimantan Utara masih dalam proses persetujuan bersama dengan DPRD. Khusus untuk Provinsi Kalimantan Utara yang sedang menyusun Rancangan Perda tentang RPJPD agar dalam penyusunan RTRW Provinsi Kalimantan Utara dapat mengintegrasikan arah kebijakan dan strategi yang telah di tetapkan.

Permasalahan secara menyeluruh di Pulau Kalimantan di bidang Penataan Ruang terkait dengan penetapan rencana pola ruang kawasan hutan oleh karena surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang harus diintegrasikan kedalam Raperda tentang RTRW belum dapat diterima/disepakati

oleh Pemerintah Daerah. Terhadap 4 (Empat) Provinsi yang telah ditetapkan Perda RTRW menggunakan upaya terobosan dengan menggambarkan deliniasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan ke dalam peta rencana pola ruang RTRWP (*outline*) sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta dalam Penataan Ruang.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2017 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 gubernur, bupati/walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, RKP Tahun 2017, serta memperhatikan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diminta perhatian gubernur, bupati, dan walikota, sesuai dengan kewenangan masing-

masing agar menyelaraskan prioritas pembangunan daerah Tahun 2016 dengan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional guna mendukung pencapaian sasaran 9 (sembilan) agenda prioritas Nawa Cita Jokowi-JK yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019.

Hadirin peserta musrenbang yang berbahagia,

Terjadi perubahan paradigma terhadap kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memposisikan perencanaan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib, menjadi salah satu fungsi penunjang seluruh urusan pemerintahan atau lintas urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Fungsi penunjang urusan pemerintahan merupakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

Saudara-saudara peserta Musrenbang yang berbahagia,

Dalam forum musrenbang regional ini, perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan daerah dengan program pembangunan yang menjadi prioritas nasional.

Diharapkan Musrenbang Regional Tahun 2016 yang akan disepakati bersama dalam Musrenbang ini menjadi landasan

pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Se-Kalimantan.

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan, Semoga Allah SWT memberikan ridho atas segala upaya yang kita lakukan dalam membangun daerah.

Selamat mengikuti Musrenbang Regional Kalimantan Tahun 2016 untuk meraih apa yang dicita-citakan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

**Sekian dan Terima kasih,
Wabillahittaufik wal hidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO